

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor : S-61/MBU/DSI/03/2021 Jakarta, 8 Maret 2021

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Hal : Peningkatan Kewaspadaan atas Modus Penipuan yang Mengatasnamakan

Kementerian BUMN

Yth.

Direksi BUMN

(daftar perusahaan terlampir) di tempat

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Kementerian BUMN menerima laporan/informasi dari berbagai pihak terutama Insan BUMN dan masyarakat umum, tentang modus-modus penipuan yang mengatasnamakan Kementerian BUMN, antara lain:
 - a. Keputusan Pengangkatan sebagai Direksi atau Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas BUMN Group termasuk Anak Perusahaan dan Cucu Perusahaan (Perusahaan Afiliasi Terkonsolidasi);
 - b. Undangan *Fit and Proper Test* sebagai bakal calon Direksi atau Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas BUMN *Group* termasuk Anak Perusahaan dan Cucu Perusahaan (Perusahaan Afiliasi Terkonsolidasi);
 - c. Janji/penawaran posisi sebagai Direksi atau Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas BUMN Group termasuk Anak Perusahaan dan Cucu Perusahaan (Perusahaan Afiliasi Terkonsolidasi);
 - d. Penawaran jasa konsultasi atas Kebijakan/Program/Kegiatan Kementerian BUMN.
- 2. Berkenaan dengan hal-hal sebagaimana dimaksud pada angka 1, dengan ini kami sampaikan bahwa:
 - a. Institusi Kementerian BUMN berkomitmen untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi secara konsisten dan berkesinambungan dalam rangka pelaksanaan tata pemerintahan yang baik *(good governance)*, termasuk menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
 - b. Menteri BUMN telah mewajibkan seluruh aparatur di lingkungan Kementerian BUMN serta pihak-pihak yang diperbantukan atau ditugaskan pada Kementerian BUMN menghindarkan diri dari sikap, perilaku, dan tindakan yang dapat mengakibatkan benturan kepentingan, termasuk di antaranya dilarang menerima Gratifikasi yang Dianggap Suap dan wajib melaporkannya kepada Unit Pengendali Gratifikasi Kementerian BUMN.
 - c. Direksi dan segenap Insan BUMN diminta untuk meningkatkan kewaspadaan atas penipuan yang mengatasnamakan Kementerian BUMN khususnya namun tidak terbatas pada modus-modus sebagaimana dimaksud pada angka 1, termasuk jika terdapat dugaan/potensi pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur/pihak-pihak yang diperbantukan atau ditugaskan pada Kementerian BUMN.

d. Dalam .../2





MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA

-2-

d. Dalam hal terdapat modus penipuan dan/atau dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c, atau hal-hal lain berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian BUMN selaku Pembina BUMN, Saudara agar segera melaporkannya kepada Kementerian BUMN melalui Whistle Blowing System Kementerian BUMN (https://wbs.bumn.go.id) dan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan Yth.:

- 1. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
- 2. Wakil Menteri BUMN I;
- 3. Wakil Menteri BUMN II;
- 4. Sekretaris Kementerian BUMN;
- 5. Deputi Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-undangan;
- 6. Inspektur Kementerian BUMN;
- 7. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.



Lampiran Surat

Nomor : S-61/MBU/DSI/03/2021

Tanggal: 8 Maret 2021

- 1. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
- 2. PT Pertamina (Persero)
- 3. PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
- 4. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
- 5. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
- 6. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
- 7. PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)
- 8. PT Pupuk Indonesia (Persero)
- 9. Perum Bulog
- 10. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
- 11. PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
- 12. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
- 13. PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
- 14. PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
- 15. PT Krakatau Steel (Persero) Tbk
- 16. PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
- 17. PT Dirgantara Indonesia (Persero)
- 18. PT Semen Baturaja (Persero) Tbk
- 19. Perum Percetakan Uang Republik Indonesia
- 20. PT Biofarma (Persero)
- 21. PT Taspen (Persero)
- 22. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)
- 23. PT Asuransi Jiwasraya (Persero)
- 24. PT Adhi Karya (Persero) Tbk
- 25. PT Waskita Karya (Persero) Tbk
- 26. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
- 27. PT Hutama Karya (Persero)
- 28. PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk
- 29. PT Pos Indonesia (Persero)
- 30. PT Pegadaian (Persero)
- 31. Perum Perhutani
- 32. PT Angkasa Pura I (Persero)
- 33. PT Angkasa Pura II (Persero)
- 34. PT Jasa Marga (Persero) Tbk
- 35. PT Kereta Api Indonesia (Persero)
- 36. PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
- 37. PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)
- 38. PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)
- 39. PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)
- 40. PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)
- 41. PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)
- 42. PT Pertani (Persero)
- 43. PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)
- 44. PT Bhanda Ghara Reksa (Persero)



Lampiran Surat

Nomor : S-61/MBU/DSI/03/2021

Tanggal: 8 Maret 2021

- 45. PT PAL Indonesia (Persero)
- 46. PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)
- 47. PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)
- 48. PT Pindad (Persero)
- 49. PT Dahana (Persero)
- 50. PT LEN Industri (Persero)
- 51. PT Industri Kereta Api (Persero)
- 52. PT Barata Indonesia (Persero)
- 53. PT Sucofindo (Persero)
- 54. PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)
- 55. PT Surveyor Indonesia (Persero)
- 56. PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)
- 57. Perum Jasa Tirta II
- 58. PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
- 59. PT Asabri (Persero)
- 60. PT Brantas Abipraya (Persero)
- 61. Perum Perumnas
- 62. PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)
- 63. PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)
- 64. PT Hotel Indonesia Natour (Persero)
- 65. PT Danareksa (Persero)
- 66. PT Permodalan Nasional Madani (Persero)
- 67. Perum LPPNPI
- 68. PT Djakarta Lloyd (Persero)
- 69. Perum Damri
- 70. PT Energy Management Indonesia (Persero)
- 71. PT Berdikari (Persero)
- 72. PT Sang Hyang Seri (Persero)
- 73. PT Garam (Persero)
- 74. Perum Perikanan Indonesia
- 75. PT Perikanan Nusantara (Persero)
- 76. PT Industri Kapal Indonesia (Persero)
- 77. PT Boma Bisma Indra (Persero)
- 78. PT Iglas (Persero)
- 79. PT Industri Sandang Nusantara (Persero)
- 80. PT Primissima (Persero)
- 81. PT Semen Kupang (Persero)
- 82. Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara
- 83. PT Balai Pustaka (Persero)
- 84. Perum Produksi Film Negara
- 85. Perum Percetakan Negara Republik Indonesia
- 86. PT Kertas Leces (Persero)
- 87. PT Kertas Kraft Aceh (Persero)
- 88 PT Industri Nuklir Indonesia (Persero)



Lampiran Surat

Nomor : S-61/MBU/DSI/03/2021

Tanggal: 8 Maret 2021

- 89. Perum Jasa Tirta I
- 90. PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero)
- 91. PT Yodya Karya (Persero)
- 92. PT Virama Karya (Persero)
- 93. PT Indra Karya (Persero)
- 94. PT Bina Karya (Persero)
- 95. PT Indah Karya (Persero)
- 96. PT Amarta Karya (Persero)
- 97. PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)
- 98. PT Kawasan Industri Medan (Persero)
- 99. PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero)
- 100. PT Kawasan Industri Makassar (Persero)
- 101. PT TWC BP dan RB (Persero)
- 102. PT Sarinah (Persero)
- 103. PT PDI Pulau Batam (Persero)
- 104. PT PANN (Persero)
- 105. Perum PPD
- 106. PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)
- 107. PT Survai Udara Penas (Persero)
 - 1 PT Surabaya Industrial Estate Rungkut
 - 2 PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung



